



Sosialisasi peran BPK RI dan DPR RI dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Hotel Mercure Pontianak. **RANGGA**

## Jangan Anggap Sepele Kelola Uang Negara

**PONTIANAK-RK.** Terjadinya korupsi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Makanya harus ada sosialisasi tentang

■ Halaman 7

### Jangan Anggap .....dari halaman 1

pengelolaan keuangan negara yang akuntable dan transparan, bebas dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan.

Di Kalbar, sosialisasi peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) disampaikan Suraia Kamaruzaman, anggota Komisi XI DPR RI, bertempat di Meranti Ballroom Hotel Mercure, Jumat (8/11).

"Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), di kita ini memang baru. Baru ada pada DPR Periode 2009-2014, sebelum itu tidak ada. Sehingga terjadinya banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti, karena datanya lebih dari dua atau tiga kali tebalnya kitab suci. Siapa yang mau bacanya? Tetapi sekarang tidak begitu, ketika laporan datang, tiga hari sudah kita pilah-pilah, dan paling lama

sepuluh hari sudah ditindaklanjuti," ujar Kamaruzaman.

Di DPR, mereka yang menganalisa laporan keuangan itu ada 20 orang. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, misalkan jumlah dalam satu fraksi satu orang, itu artinya kekuasaan politik tidak bisa ditonjolkan. Misalnya Partai Demokrat jumlahnya lebih banyak, dan Golkar di nomor dua, lalu PDIP di nomor tiga, jelas tidak bisa mengalahkannya. "Karena kalau di voting, partai besar menang. Kalau seperti ini, kita tidak pernah voting dalam pengambilan keputusan, kita berdasarkan musyawarah dan itu tanda tangan semua anggota," tutur Kamaruzaman.

Tidak sembarangan membahas dan mengelola anggaran negara. Kalau memang itu dilakukan, maka terjadilah tindak pidana korupsi. Pengelo-

laan keuangan negara melibatkan seluruh pejabat pengelola keuangan negara. Tentunya sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. "Itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban," jelas Kamaruzaman.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menuturkan, melalui seminar dan penyuluhan ini, diharapkan para birokrasi sipil maupun militer harus betul-betul mengelola keuangan negara, sesuai dengan undang-undang. Jangan dianggap sepele urusan seperti ini, kesalahan sedikit saja akan bisa jadi tindak pidana korupsi. "Akibat kelalaian dan lambat membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), terkadang masalah ini lama dalam pengerjaannya, ketika sudah ada temuan pening kepala dibuatnya," ujar Cornelis.

Sebenarnya sudah diberi

waktu 60 hari memperbaiki laporan keuangan. Harus dilihat juga persoalannya, kalau memang rumit persoalannya, tentu agak lama memperbaikinya. Makanya harus konsultasi terus dengan BPK, agar mendapat solusi dan jalan keluarnya. Namun terkadang komunikasinya tidak lancar.

"Makanya kepala SKPD itu jangan meninggalkan waktu pemeriksaan, karena biasanya bisa terjadi miss communication, dan bisa juga bisa salah tafsir. Karena itu perlu adanya memberikan penjelasan terhadap yang diperiksa, kalau tidak diberi penjelasan, tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas, dan jadilah temuan korupsi, padahal temuan itu tidak perlu jadi persoalan," tutur Cornelis.

Laporan: **Rangga D Harahap**